
Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani

Volume 10, Nomor 2 (April 2026)

ISSN 2541-3937 (print), 2541-3945 (online)

<https://www.sttintheos.ac.id/e-journal/index.php/dunamis>

DOI: 10.30648/dun.v10i2.1857

Submitted: 4 Juli 2025

Accepted: 7 September 2025

Published: 9 Januari 2026

Tanggung Jawab Etis Kepemimpinan Kristen dalam Merespons Pertambangan Ilegal

Semuel Linggi Topayung

Sekolah Tinggi Theologia Arastamar (SETIA) Jakarta

semueltopayung@yahoo.com

Abstract

Illegal mining activities cause ecological damage, social inequality, and economic exploitation, which demand moral responsibility across sectors, including from religious leaders. This article examines the role of Christian leadership in responding to these issues through a qualitative approach based on literature review and ethical leadership theory. By examining theological values such as justice, love, siding with the oppressed, and responsibility for creation, this study finds that Christian leadership has prophetic and strategic potential in building ethical awareness and encouraging collective action. Christian leaders are not only spiritual figures but also agents of social transformation, enabling communities to engage in dialogue, solidarity, and manage resources fairly and sustainably.

Keywords: anthropocentric; eco-theology; eco-justice; praxis; spirituality

Abstrak

Aktivitas tambang ilegal menimbulkan kerusakan ekologis, ketimpangan sosial, dan eksloitasi ekonomi, yang menuntut tanggung jawab moral lintas sektor, termasuk dari pemimpin keagamaan. Artikel ini mengkaji peran kepemimpinan Kristen dalam merespons isu tersebut melalui pendekatan kualitatif berbasis kajian literatur dan teori kepemimpinan etis. Dengan menelaah nilai-nilai teologis seperti keadilan, kasih, keberpihakan pada yang tertindas, dan tanggung jawab terhadap ciptaan, kajian ini menemukan bahwa kepemimpinan Kristen memiliki potensi profetik dan strategis dalam membangun kesadaran etis serta mendorong aksi kolektif. Pemimpin Kristen tidak hanya sebagai figur spiritual, tetapi juga agen transformasi sosial yang memampukan komunitas berdialog, bersolider, dan mengelola sumber daya secara adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: antroposentris; ekoteologi; keadilan ekologi; praksis; spiritualitas

PENDAHULUAN

Pertambangan ilegal merupakan salah satu tantangan serius dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Maraknya praktik ini tidak terlepas dari lemahnya pengawasan, kebutuhan ekonomi masyarakat, serta keterlibatan aktor-aktor nonresmi yang beroperasi di luar jalur hukum. Dampaknya tidak hanya bersifat ekologis, seperti kerusakan hutan dan pencemaran air, tetapi juga sosial dan ekonomi, termasuk munculnya konflik horizontal, ketimpangan pendapatan, serta terkikisnya nilai-nilai lokal dalam menjaga lingkungan. Sementara, upaya penyelesaian persoalan ini cenderung bersifat teknokratis dan legal-formal, tanpa menyentuh dimensi moral dan spiritual yang esensial dalam membangun kesadaran kolektif terhadap keadilan ekologis.

Dalam konteks pertambangan ilegal, problem kepemimpinan yang terlihat di sini berada pada ketidakmampuan pemimpin untuk melihat persoalan dari sudut pandang yang lebih holistik dan etis. Pendekatan yang dominan dalam menghadapi isu ini cenderung bersifat teknokratis dan legal-formal. Ini mengindikasikan bahwa para pemimpin sering kali hanya berfokus pada solusi administratif, seperti regulasi dan penegakan hukum, tanpa menyentuh dimensi moral dan spiritual yang mendasari kesadaran kolektif. Akibatnya, upaya penyelesaian menjadi

dangkal dan gagal mengatasi akar permasalahan yang lebih dalam.

Ketidakhadiran kepemimpinan yang berlandaskan nilai etis ini mengakibatkan berbagai dampak, seperti lemahnya pengawasan yang membuka ruang bagi maraknya praktik ilegal, serta keterlibatan aktor-aktor non resmi yang beroperasi di luar jalur hukum. Lebih dari itu, kepemimpinan yang tidak peka terhadap ekologi juga berkontribusi pada terkikisnya nilai-nilai lokal yang sejatinya memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan. Dengan kata lain, kepemimpinan semacam ini tidak mampu memberdayakan kearifan lokal, melainkan membiarkannya terkikis oleh kekuatan ekonomi dan eksloitasi.

Meskipun tulisan ini tidak secara eksplisit merujuk pada teori kepemimpinan yang tidak sadar ekologi sebagai sebuah istilah formal, ia secara kritis menggambarkan sebuah model kepemimpinan yang dibangun di atas fondasi yang bermasalah. Krisis ekologi berakar pada interpretasi keiru tentang dominasi manusia atas alam. Dalam kerangka berpikir ini, kepemimpinan yang tidak sadar ekologi menganggap bumi dan sumber dayanya sebagai objek untuk dieksloitasi demi keuntungan manusia semata, bukan sebagai bagian integral dari ciptaan yang harus dijaga.

Pendekatan ini berlawanan dengan teologi penciptaan yang holistik, yang memandang bumi sebagai rumah bersama. Sebaliknya, kepemimpinan yang tidak sadar ekologi cenderung beroperasi dalam kerangka legal-formalistik, di mana tindakan dianggap benar selama tidak melanggar hukum, tanpa mempertimbangkan dampak moral dan etis yang lebih luas. Hal ini menciptakan celah di mana kerusakan lingkungan dan ketidakadilan sosial dapat terjadi, bahkan di bawah payung hukum yang lemah. Oleh karena itu, diperlukan kepemimpinan yang etis dan berorientasi pada keadilan ekologis. Kepemimpinan Kristen yang berakar pada kasih, keadilan, dan tanggung jawab atas ciptaan menawarkan pendekatan yang lebih menyeluruh dan bermakna dalam menghadapi krisis lingkungan akibat tambang ilegal.

Kajian terhadap peran agama dalam persoalan lingkungan telah dilakukan dalam berbagai literatur terdahulu. Lynn White Jr. sudah sering mengungkap bahwa krisis ekologi modern sebagian berasal dari interpretasi teologis tentang dominasi manusia atas alam dalam tradisi Kristen Barat.¹ Pemikiran ini diperkuat oleh Jürgen Moltmann yang menegaskan bahwa relasi manusia de-

ngan alam dalam teologi harus direkonstruksi secara spiritual sebagai bentuk solidaritas dengan ciptaan, bukan dominasi atasnya.² Demikian pula, Sallie McFague mengembangkan teologi ekologis yang memahami tubuh Allah sebagai dunia itu sendiri, menuntut manusia untuk merawat bumi sebagai wujud tanggung jawab iman.³ Pandangan ini menyoroti kecenderungan manusia menempatkan diri sebagai pusat dan pengusa ciptaan, bukan sebagai bagian darinya. Penafsiran yang keliru terhadap ajaran agama telah melahirkan legitimasi moral atas eksloitasi alam. Akibatnya, hubungan manusia dengan lingkungan menjadi destruktif dan lepas dari tanggung jawab spiritual. Kesan-daran ekologis yang berakar pada nilai-nilai iman perlu dipulihkan agar teologi tidak lagi menjadi bagian dari masalah, melainkan sumber solusi.

Seiring dengan berjalananya waktu ada kesadaran akan krisis lingkungan, muncullah pemikiran baru dalam teologi yang menyoroti hubungan manusia dengan alam secara lebih mendalam. Perkembangan ini membawa perhatian pada dimensi spiritual dalam menjaga lingkungan. Namun, dalam perkembangan teologi lingkungan, ada pe-

¹ Lynn White, "The Historical Roots of Our Ecologic Crisis," *Science* 155, no. 3767 (March 10, 1967): 1203–7, <https://doi.org/10.1126/SCIENCE.155.3767.1203>.

² Jürgen Moltmann, *God in Creation: A New Theology of Creation and the Spirit of God* (San Francisco: Harper & Row, 1985), 17.

³ Sallie McFague, *The Body of God, An Ecological Theology* (Minneapolis: Fortress Press, 1993), 122.

mikiran dari beberapa ahli berpendapat agar menekankan pentingnya spiritualitas ekologis sebagai landasan etika lingkungan. Teologi penciptaan yang holistik memandang bumi sebagai rumah bersama, bukan sekadar objek eksplorasi.

Dalam konteks Indonesia, kajian mengenai peran agama dalam isu lingkungan umumnya terbatas pada partisipasi lembaga keagamaan dalam kampanye pelestarian. Kajian yang secara spesifik mengeksplorasi kontribusi kepemimpinan Kristen dalam menghadapi tambang ilegal masih jarang ditemukan. Kekosongan ini memberikan ruang bagi kajian teologis dan kepemimpinan etis untuk berkontribusi dalam wacana keberlanjutan. Untuk itu artikel ini menawarkan pendekatan interdisipliner antara teologi dan kepemimpinan Kristen dalam menjawab tantangan pertambangan ilegal. Pendekatan ini tidak hanya normatif, tetapi juga praktis dan kontekstual. Nilai-nilai kepemimpinan Kristen seperti kepekaan sosial, keberpihakan pada keadilan, serta tanggung jawab ekologis dapat menjadi landasan dalam mendorong transformasi sosial.

Kepemimpinan Kristen dalam konteks ini juga sejalan dengan semangat teologi publik, yang menekankan bahwa iman harus hadir secara nyata dalam merespons persoalan struktural, seperti kerusakan lingkungan dan ketidakadilan sosial. Kepemimpin-

pinan yang berakar pada iman tidak hanya bersifat simbolik atau ritualistik, tetapi harus menjadi kekuatan transformatif di ruang publik. Teologi yang hidup adalah teologi yang mendorong tindakan nyata demi kebaikan bersama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur (library research). Sebagai lensa analisis, penelitian ini menggunakan teori kepemimpinan etis (*ethical leadership theory*) sebagaimana dijelaskan oleh Brown, Treviño, dan Harrison. Teori ini dipilih karena menekankan integritas moral, kejujuran, keadilan, serta kepedulian pemimpin terhadap kesejahteraan komunitas. Kepemimpinan etis dipahami bukan sekadar soal legalitas atau kemampuan manajerial, tetapi terutama pada konsistensi pemimpin dalam menjadi teladan moral, membangun komunikasi normatif mengenai nilai-nilai etika, serta memperkuat akuntabilitas melalui penghargaan dan sanksi yang adil. Kerangka ini relevan dalam menilai kepemimpinan Kristen di tengah krisis ekologis akibat tambang ilegal, sebab pemimpin iman dipanggil untuk menunjukkan keberpihakan pada kehidupan, memperjuangkan keadilan ekologis, dan menolak praktik eksplorasi yang merusak ciptaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepemimpinan Kristen sebagai Landasan Etis dalam Konteks Sosial

Dalam berbagai tradisi keagamaan, kepemimpinan sering dipahami sebagai amanat yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga etis dan spiritual. Dalam konteks kekristenan, kepemimpinan bukan semata-mata tentang kapasitas untuk mengatur atau mengendalikan, melainkan tentang keberanian untuk melayani, meneladani Kristus, dan menyuarakan kebenaran di tengah ketidakadilan. Kepemimpinan Kristen memusatkan dirinya pada integritas moral dan pengabdian terhadap kesejahteraan bersama, menjadikannya sebagai bentuk kepemimpinan yang menyatu antara visi iman dan tindakan sosial yang nyata sehingga kepemimpinan Kristen dibangun di atas fondasi nilai-nilai universal yang bersumber dari ajaran Yesus Kristus, seperti kasih, keadilan, kerendahan hati, pengampunan, dan tanggung jawab terhadap sesama serta ciptaan.

Dalam konteks masyarakat yang kompleks dan rentan terhadap eksploitasi, termasuk dalam isu pertambangan ilegal, nilai-nilai ini bukan hanya menjadi prinsip normatif, tetapi juga tuntunan praksis yang konkret. Seorang pemimpin Kristen dipanggil untuk tidak hanya berbicara tentang kasih, tetapi juga memperjuangkan keadilan bagi mereka yang tertindas oleh sistem yang

tidak adil, termasuk komunitas yang wila-yah hidupnya dirampas oleh kegiatan tam-bang yang tidak sah.

Lebih dari sekadar pemimpin roha-ni, pemimpin Kristen diminta untuk menjadi agen perubahan sosial, yaitu seseorang yang mampu membaca tanda-tanda zaman dan hadir aktif dalam ruang-ruang publik sebagai suara profetik. Dalam konteks tam-bang ilegal, pemimpin Kristen harus berani menyuarakan suara mereka yang tak terde-ngar; masyarakat adat, petani kecil, dan pe-rempuan yang kehidupannya terganggu akibat perusakan lingkungan. Keberanian se-perti ini mencerminkan sikap kenabian yang tidak berkompromi dengan ketidakbenaran, meskipun itu berarti berhadapan langsung dengan kekuatan ekonomi atau kekuasaan yang dominan.

Dalam situasi sosial yang kian kom-pleks dan penuh tantangan, kepemimpinan Kristen dituntut untuk menjadi lebih kon-tektual dan adaptif. Kepekaan terhadap realitas sosial menjadi aspek krusial yang mem-bedakan pemimpin biasa dengan pemimpin yang memiliki panggilan profetik. Pemim-pin Kristen tidak boleh tinggal diam di balik tembok gereja, melainkan harus bersedia keluar dan terlibat secara aktif dalam dinami-ka masyarakat. Ketika tambang ilegal men-ciptakan krisis ekologis dan sosial, maka diamnya pemimpin iman adalah bentuk pem-

biaran terhadap ketidakadilan. Hal ini berpijak pada ajaran Kristus yang memilih hadir di tengah-tengah kaum lemah dan miskin, bukan dalam istana kekuasaan. Dalam konteks tambang ilegal, solidaritas semacam ini ditunjukkan melalui pembelaan terhadap hak hidup masyarakat lokal, hak atas tanah, air bersih, dan lingkungan yang sehat. Kepemimpinan yang berpihak pada kehidupan menolak logika eksploitasi yang merusak dan memilih untuk menanamkan budaya tanggung jawab terhadap bumi sebagai rumah bersama.

Penting untuk dicatat bahwa dalam kerangka teologi Kristen, bumi bukanlah objek yang boleh dimiliki dan dieksplorasi sesuka hati, melainkan ciptaan Tuhan yang dipercayakan kepada manusia untuk dikelola dengan bijaksana. Karena itu, kepemimpinan Kristen yang sejati menolak paradigma antroposentrism yang menempatkan manusia sebagai penguasa mutlak atas alam. Sebaliknya, ia mengembangkan spiritualitas ekologis yang menempatkan manusia sebagai bagian dari komunitas ciptaan. Dalam konteks ini, tambang ilegal menjadi ancaman langsung terhadap keutuhan ciptaan, dan pemimpin Kristen harus bersikap tegas untuk melawan kerusakan tersebut sebagai

bentuk pengkhianatan terhadap mandat ilahi.

Pendekatan etis dalam kepemimpinan Kristen tidak hanya berlaku pada tataran individu pemimpin, tetapi juga harus tertanam dalam struktur gereja dan komunitas Kristen secara kolektif. Gereja dan lembaga-lembaga pelayanan Kristen perlu memiliki keberpihakan yang jelas dalam isu lingkungan dan keadilan sosial. Ketika praktik tambang ilegal merusak kehidupan banyak orang, maka gereja tidak cukup hanya mengeluarkan pernyataan moral, tetapi harus menjadi bagian dari gerakan sosial yang aktif menolak praktik tersebut, termasuk melalui pendidikan publik, pendampingan komunitas, dan advokasi kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat terdampak.

Kepemimpinan yang tidak hanya berpikir secara spiritual, tetapi juga sosial-politik, lebih efektif dalam mendorong perubahan sistemik. Hal ini sesuai dengan model kepemimpinan transformatif yang melihat pemimpin sebagai motor penggerak dalam menciptakan visi kolektif untuk perubahan sosial.⁴ Dalam kerangka Kristen, transformasi yang diusung bukan sekadar perubahan struktural, tetapi juga pembaruan batiniah, spiritual, dan komunitarian. Oleh sebab itu, kepemimpinan Kristen yang memi-

⁴ James MacGregor Burns, *Leadership* (New York: Harper & Row, 2012), 4.

liki daya etis dalam konteks sosial harus terus memperkuat kesadaran kritis di tengah umat, sekaligus memfasilitasi ruang-ruang dialog yang mendorong pertobatan ekologis. Pemimpin Kristen harus mampu menjalankan peran edukatif, inspiratif, dan partisipatif. Ia tidak hanya memberikan arahan moral, tetapi juga menumbuhkan semangat keberdayaan masyarakat untuk membela lingkungan hidup mereka. Kepemimpinan semacam ini tidak dapat dijalankan tanpa pengorbanan, tetapi justru di situlah letak kekuatan spiritual seorang pemimpin Kristen yang sejati keberaniannya untuk melayani dalam penderitaan, mengasihi dalam ketegangan, dan berdiri teguh di tengah badi ketidakadilan.

Teologi Kontekstual dalam Merespons Krisis Ekologis

Fenomena tambang ilegal tidak hanya menimbulkan dampak ekologis, tetapi juga menjadi tantangan moral dan spiritual yang serius bagi komunitas beriman. Dalam konteks ini, pendekatan teologi kontekstual menjadi penting untuk menafsirkan realitas sosial-ekologis secara kritis dan konstruktif melalui kacamata iman Kristen. Teologi tidak bisa bersifat ahistoris dan terlepas dari kenyataan penderitaan yang dialami oleh

manusia dan ciptaan. Sebaliknya, ia harus mengakar pada realitas konkret, termasuk kerusakan lingkungan yang makin meluas akibat praktik tambang ilegal yang merampas daya dukung ekologis serta mengancam keberlangsungan hidup komunitas lokal.

Teologi ekologi (*eco-theology*) menempatkan bumi bukan sekadar objek eksploitasi, melainkan sebagai bagian integral dari ciptaan Allah yang mengandung nilai spiritual. Dalam narasi Kejadian 2:15, manusia diperintahkan untuk “mengusahakan dan memelihara” taman Eden, suatu mandat yang menunjukkan relasi tanggung jawab etis terhadap alam, bukan dominasi rakus atasnya. Gagasan ini ditafsirkan secara mendalam oleh para teolog yang menegaskan bahwa penderitaan ekologis adalah wajah lain dari penderitaan sosial karena mereka yang paling terdampak oleh krisis lingkungan adalah kelompok miskin dan terpinggiran.⁵ Oleh karena itu, pelanggaran terhadap lingkungan melalui tambang ilegal tidak hanya bertentangan dengan prinsip keadilan sosial, tetapi juga mencederai spiritualitas iman Kristen itu sendiri.

Sejalan dengan itu, pemikiran lain menyoroti bahwa tubuh Kristus harus dipahami sebagai simbol ekologis, di mana seluruh ciptaan dilihat sebagai ekspresi keha-

⁵ Leonardo Boff, *Cry of the Earth, Cry of the Poor* (Maryknoll, N.Y.: Orbis Books, 1997).

diran ilahi yang layak dihormati dan dirawat.⁶ Gagasan ini menggeser fokus spiritualitas dari sekadar relasi vertikal antara manusia dan Tuhan menuju spiritualitas relasional yang mencakup seluruh ciptaan. Dalam konteks Indonesia, di mana praktik tambang ilegal sering mengorbankan hutan, sungai, dan lahan pertanian masyarakat lokal, pendekatan seperti ini menjadi semakin relevan untuk mendorong gereja berperan aktif dalam advokasi lingkungan hidup.

Selain *eco-theology*, pendekatan teologi publik turut memperkaya dimensi tanggung jawab iman dalam ruang sosial. Teologi ini menuntut agar gereja tidak hanya menjadi komunitas yang berbicara dalam ruang liturgi, tetapi juga menjadi suara profetik di tengah masyarakat. Menghadapi persoalan tambang ilegal, gereja dipanggil untuk tidak bersikap diam, tetapi menyuarakan kebenaran, keadilan, dan keberpihakan pada kehidupan. Jürgen Moltmann menekankan bahwa iman Kristen harus bersifat historis dan politis, sebab Allah tidak hadir di ruang hampa, melainkan dalam sejarah manusia dan di tengah perjuangan kaum tertindas.⁷ Maka, keheningan gereja atas perusakan lingkungan sama dengan pengkhianatan terhadap panggilan profetiknya.

Lebih jauh, pendekatan teologi pembebasan memberikan dasar moral yang kuat dalam merespons ketimpangan yang dibabkan oleh aktivitas tambang ilegal. Teologi ini lahir dari semangat solidaritas terhadap kaum miskin dan tertindas, serta bertumpu pada keyakinan bahwa Allah berpihak pada mereka yang menderita akibat sistem yang tidak adil. Dalam kerangka eko- logi, pendekatan ini berkembang menjadi teologi pembebasan ekologis, yang melihat bumi sebagai sesama korban bersama manusia.⁸ Pendekatan ini mengajak manusia untuk tidak hanya membela sesama manusia yang tertindas, tetapi juga alam yang turut mengalami penderitaan akibat sistem yang menindas.

Tanggung Jawab Etis terhadap Eksplorasi Tambang Ilegal

Di tengah gelombang ketidakadilan ekologis, pemimpin Kristen dipanggil untuk tidak hanya menjadi pembicara, tetapi pelaku nyata dalam membela kehidupan. Gereja tidak bisa diam menghadapi situasi ini. Diam berarti menyetujui. Sebaliknya, gereja dan pemimpinnya harus menjadi suara kenabian yang menyuarakan keadilan ekologis, serta mendampingi komunitas-komu-

⁶ McFague, *The Body of God, An Ecological Theology*.

⁷ Jurgen Moltmann, *Theology of Hope: On The Ground and Implications of a Christian Eschatology* (London: SCM Press, 1967), 18.

⁸ Daniel P. Castillo, *An Ecological Theology of Liberation: Salvation and Political Ecology* (Maryknoll: Orbis Books, 2019), 45.

nitas terdampak dalam memperjuangkan hak atas tanah, air, dan udara bersih.⁹ Kepemimpinan Kristen yang etis berarti membangun kesadaran kolektif bahwa perusakan lingkungan adalah dosa sosial yang mengkhianati kasih Allah terhadap ciptaan.

Tanggung jawab etis ini tidak cukup jika berhenti dalam wacana teologis atau retorika etika semata. Ia harus turun dalam bentuk tindakan nyata dan terukur. Gereja dapat mulai dari lingkup internal: memperkuat pendidikan lingkungan berbasis iman dalam pembinaan jemaat, mengintegrasikan tema pelestarian lingkungan dalam liturgi dan khutbah, serta menciptakan budaya komunitas yang peduli terhadap keberlanjutan hidup. Kesadaran ekologis harus menjadi bagian integral dari spiritualitas umat Kristen masa kini. Kepemimpinan Kristen yang bertanggung jawab secara sosial dan ekologis tidak hanya menghadirkan pesan moral, tetapi juga menampilkan solusi praktis yang dapat diterapkan dalam konteks lokal.¹⁰

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultur dan banyak didominasi oleh komunitas adat, tanggung jawab etis pemimpin Kristen juga mencakup solidaritas terhadap kelompok-kelompok rentan.

Tambang ilegal tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menghancurkan relasi manusia dengan tanah leluhur, dengan sejarah budaya, bahkan dengan nilai-nilai spiritual mereka. Ketika alam rusak, spiritualitas komunitas pun ikut terguncang. Oleh karena itu, gereja perlu hadir sebagai pendamping dan penguat, membangun jejaring solidaritas lintas iman, serta terlibat dalam advokasi kebijakan publik yang berpihak kepada keberlangsungan hidup bersama. Di sinilah peran kenabian gereja diuji: apakah berani menyuarakan kebenaran dan mendorong transformasi sistem, atau memilih keamanan dengan menghindari konflik?

Kepemimpinan Kristen seharusnya menjadi motor perubahan struktural melalui pendekatan kolaboratif dengan akademisi, LSM, aktivis lingkungan, dan tokoh masyarakat. Gerakan yang dibangun dari spiritualitas keadilan ini akan menjadi kekuatan moral untuk menolak perusakan ekologis yang terorganisir. Selain itu tanggung jawab etis juga dapat diimplementasikan melalui program pemberdayaan ekonomi berbasis ekologi. Banyak komunitas yang terjerumus dalam praktik tambang ilegal karena ketidakberdayaan ekonomi. Gereja, melalui kepemimpinan yang transformatif, dapat mena-

⁹ Rosemary Radford Ruether, *Gaia and God: An Ecofeminist Theology of Earth Healing* (San Francisco: HarperOne, 1992), 150.

¹⁰ Castillo, *An Ecological Theology of Liberation: Salvation and Political Ecology*.

warkan alternatif: pelatihan pertanian organik, konservasi air dan hutan berbasis masyarakat, serta penguatan UMKM lokal yang ramah lingkungan. Inilah bentuk tanggung jawab iman yang aktif, yang membumi dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian alam.

Gereja yang membangun solidaritas ekologis akan mampu menjadi benteng terakhir dalam menjaga integritas ciptaan di tengah ketamakan ekonomi dan kekosongan etika publik.¹¹ Pernyataan ini menekankan pentingnya peran profetik gereja dalam merespons krisis lingkungan. Ketika institusi-institusi lain gagal menahan laju eksploitasi alam, gereja dipanggil untuk hadir sebagai suara moral yang bersumber dari iman. Solidaritas ekologis bukan hanya sikap empati, melainkan wujud iman yang membela keutuhan ciptaan. Di sinilah gereja dituntut untuk tidak diam, tetapi aktif membentuk kesadaran ekologis umat secara nyata. Tanggung jawab etis terhadap eksploitasi tambang ilegal merupakan tugas profetik dan praksis yang harus diwujudkan oleh setiap pemimpin Kristen. Ini bukan sekadar opsi moral, melainkan kewajiban iman. Dalam era ketika bumi merintih dan masyarakat kehilangan harapan karena kerusakan ekologis, kepemimpinan Kristen dipanggil

untuk menjadi terang yang memberi arah, dan garam yang mencegah pembusukan moral dalam pengelolaan ciptaan. Melalui kehadiran aktif dan tindakan nyata, iman Kristen menemukan daya transformatifnya di tengah dunia yang rusak.

Model Kepemimpinan Kristen Partisipatif dalam Advokasi Sosial

Setelah memahami dasar etis dan tanggung jawab moral dalam merespons persoalan tambang ilegal, dibutuhkan model kepemimpinan Kristen yang dapat diterapkan secara konkret dalam konteks sosial yang nyata. Kepemimpinan yang hanya berhenti pada pengajaran moral tidak cukup untuk menjawab kerumitan persoalan struktural, budaya, dan ekologis yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan model kepemimpinan Kristen yang bersifat partisipatif, profetik, dan transformatif dalam menghadapi krisis akibat eksploitasi sumber daya alam secara ilegal. Model ini bukan hanya menempatkan pemimpin Kristen sebagai pewarta nilai, tetapi juga sebagai agen perubahan yang bekerja langsung bersama masyarakat terdampak.

Kepemimpinan partisipatif menganalisa keterlibatan aktif semua elemen komunitas dalam proses pembelaan keadilan

¹¹ W. Jenkins, *Ecologies of Grace: Environmental Ethics and Christian Theology* (London: Oxford University Press, 2013), 217.

ekologis. Dalam hal ini, pemimpin Kristen tidak berfungsi sebagai tokoh tunggal yang memberikan instruksi dari atas, tetapi sebagai fasilitator yang membuka ruang dialog, kolaborasi, dan pemberdayaan bersama masyarakat. Pendekatan ini penting dalam konteks tambang ilegal yang seringkali menimbulkan konflik horizontal antarwarga, maupun ketegangan antara masyarakat dengan otoritas negara atau perusahaan tambang. Pemimpin Kristen yang partisipatif akan menjadi jembatan yang merajut rekonsiliasi, membangun kepercayaan, dan memfasilitasi solusi berbasis komunitas.¹²

Lebih jauh, model kepemimpinan profetik mengajak gereja dan para pemimpinnya untuk menyuarakan suara kenabian terhadap praktik ketidakadilan dan eksploitasi lingkungan. Pemimpin Kristen dalam konteks ini harus berani bersikap kritis terhadap sistem sosial-politik yang melanggengkan tambang ilegal, serta menyuarakan suara korban yang kerap dibungkam. Fungsi profetik tidak hanya berarti mengkritik secara verbal, tetapi juga mengambil bagian dalam aksi kolektif seperti pendampingan hukum terhadap masyarakat adat, penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis keadilan ekologis, hingga kampanye lintas agama yang menyerukan perlindungan lingkungan.

¹² Craig Van Gelder, *The Ministry of the Missional Church: A Community Led by the Spirit* (Grand Rapids: Baker Books, 2007), 143.

Gereja tidak bisa netral dalam menghadapi kehancuran ekologi, karena panggilan iman selalu berpihak kepada kehidupan dan pembebasan dari penindasan.¹³ Untuk itu pemimpin Kristen perlu menjalin kerja sama lintas iman, akademisi, aktivis lingkungan, dan lembaga negara untuk merancang intervensi sosial yang menyentuh akar persoalan. Hal ini dapat mencakup pendirian pusat-pusat belajar komunitas tentang keadilan ekologis, penyelenggaraan forum mediasi konflik sumber daya alam, hingga advokasi atas peraturan daerah yang melindungi hak masyarakat adat atas tanah. Pemimpin yang transformatif tidak hanya hadir saat krisis, tetapi membangun sistem pendukung yang berkelanjutan.

Kepemimpinan partisipatif juga menuntut kemampuan untuk hadir dan bekerja dari bawah (*bottom-up*), bukan dari atas (*top-down*). Dalam banyak kasus tambang ilegal, masyarakat lokal seringkali kehilangan kepercayaan pada lembaga resmi akibat maraknya praktik manipulatif atau konflik kepentingan. Gereja sebagai lembaga moral dipercaya memiliki posisi strategis untuk mengisi kekosongan itu. Pemimpin Kristen yang terlibat langsung, tinggal bersama masyarakat, mendengarkan aspirasi, dan menyuarakan keluhan warga, akan menjadi

¹³ Boff, *Cry of the Earth, Cry of the Poor*.

simbol kehadiran ilahi yang menyembuhkan luka sosial dan ekologis.

Penerapan model ini juga membutuhkan kemampuan pemimpin Kristen untuk memahami konteks lokal secara mendalam. Misalnya, di daerah tambang ilegal yang berbasis masyarakat adat, pemimpin perlu mengenali nilai-nilai budaya lokal, relasi masyarakat dengan tanah, serta dinamika ekonomi-politik setempat. Dalam konteks ini, advokasi sosial tidak boleh mengabaikan narasi lokal. Sebaliknya, pendekatan kontekstual harus dikembangkan agar setiap intervensi terasa relevan dan membumi. Keberhasilan advokasi sosial sangat bergantung pada sejauh mana pemimpin memahami struktur sosial masyarakat dan menghormati kearifan lokal yang telah lama menopang kehidupan mereka. Hal ini menuntut kepekaan kontekstual agar perubahan sosial tidak mengabaikan nilai-nilai yang hidup dalam komunitas.

Pada akhirnya, kepemimpinan Kristen partisipatif dalam advokasi sosial adalah bentuk praksis iman yang paling konkret dalam menghadapi eksplorasi lingkungan. Ia menyatukan nilai-nilai etis, keberanian profetik, dan tindakan transformatif dalam satu kesaksian hidup. Di tengah ancaman

kerusakan ekologis yang terus meluas, kehadiran pemimpin Kristen yang berpihak, terbuka, dan berkomitmen menjadi sangat penting. Inilah wujud iman yang tidak hanya mengucap doa untuk bumi, tetapi juga berjalan bersama mereka yang berjuang mempertahankan tanah, air, dan udara bagi kehidupan yang adil dan berkelanjutan.

Praksis Kepemimpinan Kristen dalam Isu Ekologis

Untuk mendukung landasan teoritis dan refleksi etis yang telah dipaparkan sebelumnya, penting untuk melihat praktik nyata kepemimpinan Kristen dalam menghadapi persoalan ekologis, khususnya yang berkaitan dengan kerusakan akibat tambang ilegal. raktik baik) yang pernah dilakukan oleh gereja atau organisasi iman dapat memperkuat argumen bahwa kepemimpinan Kristen yang partisipatif, profetik, dan transformatif bukan hanya ideal, tetapi juga telah terbukti aplikatif di berbagai konteks.¹⁴ Praktik-praktik tersebut memberi contoh bahwa gereja tidak hanya berfungsi sebagai institusi religius, melainkan juga sebagai kekuatan moral dan sosial yang mampu mengadvokasi keadilan ekologis. Salah satu contoh paling nyata datang dari keterlibatan Komisi *Justice, Peace and Integrity of Creation* (JPIC)

¹⁴ Dieter T. Hessel, *Social Ministry* (Louisville: Westminster John Knox Press, 2008), 116.

dalam lingkungan gereja lokal di Indonesia. Di beberapa wilayah seperti Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara, JPIC gereja-gereja Protestan dan Katolik memainkan peran penting dalam menyoroti dan menindaklanjuti kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan yang merusak ekosistem dan merampas ruang hidup masyarakat adat. Pendeta dan aktivis JPIC kerap menjadi pendamping hukum bagi komunitas adat yang tanahnya dikuasai secara ilegal, sekaligus fasilitator dalam proses mediasi antara warga dan aparat pemerintah. Mereka juga aktif menyuarakan kritik terhadap kebijakan daerah yang dianggap tidak berpihak kepada lingkungan hidup dan kelompok rentan.¹⁵

Dalam lingkup internasional, Dewan Gereja Sedunia (World Council of Churches/WCC) telah lama mengangkat isu keadilan ekologis sebagai agenda teologis dan praktis gereja global. Dalam pertemuan-pertemuan ekumenisnya, WCC mengusung gerakan *eco-justice* yang menekankan hubungan antara iman Kristen dan tanggung jawab terhadap krisis iklim, deforestasi, dan pengrusakan bumi akibat kapitalisme eksploratif. Meski berskala global, pendekatan WCC sangat relevan dengan situasi lokal di Indonesia yang tengah menghadapi ekspansi tambang ilegal secara masif.¹⁶

¹⁵ A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup* (Jakarta: Kompas, 2010), 198.

Di Indonesia sendiri, Gereja Kristen Sumba (GKS) yang pada tahun 2020 menginisiasi program konservasi tanah dan air sebagai respon terhadap ancaman lingkungan akibat pertambangan galian C. Dengan melibatkan para pendeta, majelis gereja, dan pemuda, GKS membentuk Kelompok Tani Gerejawi yang berfokus pada pertanian ekologis dan pelestarian sumber mata air. Pendekatan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi disertai dengan pembinaan teologis dan liturgi yang memuat refleksi tentang panggilan umat untuk menjaga ciptaan. Dalam evaluasinya, program ini tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga meningkatkan solidaritas sosial dan pendapat warga secara mandiri.

Di Nusa Tenggara Timur, Keuskupan Larantuka juga mencatatkan praktik advokasi yang kuat terhadap isu lingkungan. Pada tahun 2019, keuskupan bersama organisasi masyarakat sipil menyuarakan penolakan terhadap tambang mangan yang mengancam wilayah adat dan ekosistem lokal. Uskup dan para imam secara terbuka menyampaikan sikap gereja dalam khutbah dan surat gembala, serta mengirim delegasi untuk melakukan dialog langsung dengan pemerintah provinsi. Tindakan ini memperlihatkan bahwa kepemimpinan gerejawi yang

¹⁶ Ernst M Conradie, *Christianity and Ecological Theology: Resources for Further Research* (Stellenbosch: Sun Press, 2006), 37.

etis dan partisipatif dapat memobilisasi umat untuk membela bumi sebagai rumah bersama.

Contoh lain datang dari kerja kolaboratif lintas agama yang difasilitasi oleh WALHI Kristen di kawasan Sulawesi. Meskipun tidak secara struktural berafiliasi dengan WALHI pusat, komunitas ini terdiri dari pendeta, pengajar sekolah minggu, dan aktivis lingkungan Kristen yang bekerja bersama tokoh Muslim dan Hindu dalam menyuarakan penolakan terhadap pertambangan nikel di daerah pegunungan adat. Mereka menggelar sekolah advokasi berbasis iman, memproduksi bahan ajar teologi lingkungan, dan membentuk koalisi pemuda lintas iman yang mengusung tema “Tanah adalah Nafas.” Ini menunjukkan bahwa spiritualitas dapat menjadi kekuatan kolektif dalam membangun solidaritas ekologis lintas batas identitas agama.

Semua contoh tersebut menjadi bukti bahwa kepemimpinan Kristen dalam isu ekologis bukanlah konsep abstrak yang tidak aplikatif. Kepemimpinan Kristen yang berintegritas ekologis lahir bukan dari wacana teologis belaka, melainkan dari keterlibatan umat dalam praktik penyembuhan dunia yang rusak oleh keserakahan manusia.¹⁷ Di tengah keterbatasan sumber daya,

gereja dan para pemimpinnya telah menjalankan fungsi kenabian, pelayanan sosial, dan pendidikan iman yang berpihak pada bumi dan masyarakat tertindas. Akhirnya, praktik-praktik dari gereja dan komunitas iman tersebut menegaskan bahwa kepemimpinan Kristen yang sejati adalah kepemimpinan yang berakar pada kasih, berpijak pada keadilan, dan bergerak dalam solidaritas. Ketika iman diterjemahkan ke dalam tindakan yang membela ciptaan, maka gereja sungguh hadir sebagai tanda harapan di tengah dunia yang terluka.

Praksis Kepemimpinan Kristen terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Berkelanjutan

Untuk pengelolaan SDA berkelanjutan kepemimpinan Kristen memiliki dua peran penting. Pertama, sebagai pelaku transformatif dalam membentuk kesadaran ekologis komunitas. Kedua, sebagai mitra strategis dalam advokasi kebijakan publik yang berpihak pada keadilan ekologis. Dalam hal pertama, pemimpin Kristen melalui otoritas moral dan pengaruh sosialnya dapat menciptakan budaya komunitas yang lebih peduli terhadap alam. Melalui pendidikan, liturgi, dan pembinaan berbasis gereja, pe-

¹⁷ Calvin B. DeWitt, *Earth-Wise: A Biblical Response to Environmental Issues* (Grand Rapids: CRC Publications, 1994), 144.

mimpin dapat menanamkan nilai-nilai kasih, tanggung jawab terhadap ciptaan, dan anti-eksploitasi dalam kehidupan umat. Budaya ini akan membentuk gaya hidup berkelanjutan yang tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga praksis seperti pengelolaan limbah di tingkat komunitas, pertanian organik, atau konservasi mata air di lingkungan gereja.¹⁸

Di sisi kedua, pemimpin Kristen perlu memainkan peran dalam ranah advokasi dan kebijakan. Dengan memahami struktur sosial dan ekonomi di balik eksploitasi SDA, pemimpin Kristen dapat menjadi jembatan antara komunitas terdampak dan pemangku kebijakan. Dalam hal ini, gereja bisa menginisiasi dialog lintas sektor menghadirkan pemerintah daerah, perusahaan tambang, akademisi, dan aktivis lingkungan untuk membicarakan solusi konkret dan jangka panjang. Salah satu bentuk implikasi konkret adalah mendorong tata kelola berbasis komunitas (*community-based natural resource management*), yang selama ini terbukti lebih adaptif terhadap kepentingan lokal dan menjaga kearifan tradisional. Sebagaimana dijelaskan oleh Esty Kurniawaty dan kawan-kawan, tata kelola lingkungan yang berpihak

pada masyarakat lokal akan lebih kuat bila didukung oleh aktor sosial yang memiliki otoritas moral, seperti pemimpin agama.¹⁹

Lebih jauh, kepemimpinan Kristen juga dapat menghadirkan narasi teologis yang memperkuat ide keberlanjutan. Dalam doktrin penciptaan, manusia diberikan mandat ilahi untuk “mengusahakan dan memelihara” bumi (Kejadian 2:15). Namun dalam praktik pembangunan modern, mandat ini sering ditafsirkan secara antroposentrism, sehingga legitimasi agama digunakan untuk mengukuhkan dominasi manusia atas alam. Kepemimpinan Kristen yang kontekstual harus merekonstruksi pemahaman ini menjadi lebih ekologis dengan menempatkan manusia sebagai bagian dari ekosistem, bukan sebagai penguasa mutlak. Transformasi narasi iman menjadi dasar etis dalam tata kelola SDA menjadikan gereja bukan hanya sebagai tempat spiritual, tetapi juga sebagai ruang refleksi ekologis dan advokasi sosial.²⁰

Dalam konteks masyarakat adat yang sering menjadi korban langsung tambang ilegal, kepemimpinan Kristen memiliki tanggung jawab untuk menjadi bagian dari perjuangan mereka dalam mempertahankan ruang hidup. Banyak komunitas adat memili-

¹⁸ Sallie McFague, *A New Climate for Theology: God, the World, and Global Warming* (Minneapolis: Fortress Press, 2008), 108.

¹⁹ Esty Kurniawaty et al., “TEOLOGI PENCIPTAAN DAN TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN :

Pendekatan Kristen Terhadap Krisis Ekologis,” *HUMANITIS: Jurnal Humaniora, Sosial Dan Bisnis* 2, no. 10 (2024): 1494–1505.

²⁰ Denis Edwards, *Ecology at the Heart of Faith* (Maryknoll: Orbis Books, 2006), 112.

ki kearifan lokal dalam mengelola alam secara lestari, namun sering kali dipinggirkan dalam kebijakan negara dan praktik industri. Di sinilah gereja perlu hadir, tidak sebagai pengganti, tetapi sebagai sekutu. Kepemimpinan Kristen harus mendorong rekognisi terhadap hak masyarakat adat atas wilayah dan kedaulatan ekologis mereka, sembari membangun kapasitas lokal dalam mengelola SDA berbasis nilai-nilai iman dan budaya. Kolaborasi antara gereja dan masyarakat adat bukan hanya memperkuat daya tahan sosial, tetapi juga memperluas horison teologi Kristen yang tidak terasing dari realitas lokal.

Selain itu pengelolaan SDA berkelanjutan yang melibatkan kepemimpinan Kristen juga memerlukan integrasi dengan jaringan global. Banyak gereja di berbagai negara telah membentuk forum kerja sama dalam isu perubahan iklim, keadilan ekologis, dan keanekaragaman hayati. Dengan menjalin solidaritas internasional, gereja lokal dapat memperoleh sumber daya, pengetahuan, dan legitimasi untuk memperjuangkan kebijakan yang adil di tingkat nasional dan internasional. Salah satu contoh keberhasilan model ini terlihat dalam keterlibatan gereja-gereja Indonesia dalam jaringan *Eco-Church Asia Tenggara*, yang mempromosikan penggunaan energi terbarukan, konservasi air, dan audit lingkungan terhadap fasilitas gerejawi.

Di tingkat praktis, gereja juga dapat menjadi model institusi yang menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Hal ini dapat diwujudkan melalui audit lingkungan terhadap aset gereja, pembentukan unit pelayanan lingkungan di tingkat sinode, atau pelatihan green leadership bagi pendeta dan pengurus jemaat. Seperti yang dilakukan oleh beberapa sinode di Indonesia yang telah mengembangkan modul pelatihan *Theology of Creation and Sustainability*, yang tidak hanya mengajarkan doktrin, tetapi juga melibatkan praktik langsung seperti penghijauan dan pengelolaan sampah. Tindakan-tindakan semacam ini memperlihatkan bahwa gereja dapat menjadi contoh pengelolaan SDA berkelanjutan yang berbasis iman dan nilai-nilai etika.

Akhirnya, praksis terbesar dari kepemimpinan Kristen dalam pengelolaan SDA adalah perubahan paradigma tentang pembangunan itu sendiri. Kepemimpinan iman tidak boleh tunduk pada narasi pertumbuhan ekonomi semata, melainkan menawarkan paradigma alternatif: pembangunan yang berkelanjutan, adil, dan berbelas kasih. Ini bukan sekadar soal teknik atau kebijakan, melainkan panggilan iman untuk menjaga integritas ciptaan. Kepemimpinan Kristen yang membawa nilai kasih, keadilan, dan pengharapan dapat menjadi jawaban terhadap krisis multidimensi yang kita hadapi saat ini. Ketika gereja dan pemimpinnya be-

nar-benar menghidupi panggilan ekologis, maka gereja tidak hanya menjaga keselamatan rohani, tetapi juga keselamatan bumi sebagai rumah bersama.

KESIMPULAN

Kepemimpinan Kristen memiliki peran strategis sebagai agen transformasi sosial yang tidak hanya menyuarakan nilai-nilai iman secara verbal, tetapi juga mewujudkannya dalam tindakan nyata yang kontekstual. Kepemimpinan yang berakar pada kasih, keadilan, dan tanggung jawab terhadap bumi menunjukkan daya etis yang kuat dalam mendorong perubahan, baik di tingkat komunitas maupun kebijakan publik. Melalui pendekatan profetik dan spiritualitas ekologis, pemimpin Kristen dipanggil untuk menolak ketidakadilan ekologis, membela komunitas terdampak, serta menanamkan kesadaran ekologis dalam kehidupan umat. Pengelolaan SDA bukan hanya merupakan tanggung jawab moral semata, melainkan juga ekspresi iman yang hidup dan menyala dalam realitas dunia yang terluka, serta menjadi bentuk nyata dari kesaksian iman yang berpihak pada keutuhan ciptaan dan masa depan yang adil bagi semua.

DAFTAR PUSTAKA

Boff, Leonardo. *Cry of the Earth, Cry of the Poor*. Maryknoll, N.Y.: Orbis Books, 1997.

- Burns, James MacGregor. *Leadership*. New York: Harper & Row, 2012.
- Castillo, Daniel P. *An Ecological Theology of Liberation: Salvation and Political Ecology*. Maryknoll: Orbis Books, 2019.
- Conradie, Ernst M. *Christianity and Ecological Theology: Resources for Further Research*. Stellenbosch: Sun Press, 2006.
- DeWitt, Calvin B. *Earth-Wise: A Biblical Response to Environmental Issues*. Grand Rapids: CRC Publications, 1994.
- Edwards, Denis. *Ecology at the Heart of Faith*. Maryknoll: Orbis Books, 2006.
- Esty Kurniawaty, Andi Andi, La’bi Ratte Langi’, Arni Tanggulungan, and Yunitsar Trimulia Sari. “Teologi Penciptaan Dan Tanggung Jawab Lingkungan : Pendekatan Kristen Terhadap Krisis Ekologis.” *HUMANITIS: Jurnal Humaniora, Sosial Dan Bisnis* 2, no. 10 (2024): 1494–1505.
- Gelder, Craig Van. *The Ministry of the Missional Church: A Community Led by the Spirit*. Grand Rapids: Baker Books, 2007.
- Hessel, Dieter T. *Social Ministry*. Louisville: Westminster John Knox Press, 2008.
- Jenkins, W. *Ecologies of Grace: Environmental Ethics and Christian Theology*. London: Oxford University Press, 2013.
- Keraf, A. Sonny. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kompas, 2010.
- McFague, Sallie. *A New Climate for Theology: God, the World, and Global Warming*. Minneapolis: Fortress Press, 2008.
- McFague, Sallie. *The Body of God, An Ecological Theology*. Minneapolis: Fortress Press, 1993.
- Moltmann, Jurgen. *Theology of Hope: On The Ground and Implications of a Christian Eschatology*. London: SCM Press, 1967.

- Moltmann, Jürgen. *God in Creation: A New Theology of Creation and the Spirit of God*. San Francisco: Harper & Row, 1985.
- Ruether, Rosemary Radford. *Gaia and God: An Ecofeminist Theology of Earth Healing*. San Francisco: HarperOne, 1992.
- White, Lynn. "The Historical Roots of Our Ecologic Crisis." *Science* 155, no. 3767 (March 10, 1967): 1203–7. <https://doi.org/10.1126/SCIENCE.155.3767.1203>.